



KPK

DIMINTA DALAMI

Dana Suap Gidot

Polda Sebut Penanganan Kasus Bansus Bengkayang Sudah Profesional

PONTIANAK - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat membantah keras pernyataan Suryadman Gidot terkait uang suap akan digunakan untuk mengurus kasus Bansus BP-KAD Kabupaten Bengkayang yang saat ini tengah ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar.

Pernyataan Bupati Bengkayang itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum KPK usai sidang suap proyek pembangunan di Pemkab Bengkayang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak, kemarin.

"Kami mempersilakan KPK

◆ Ke Halaman 7 kolom 1



KPK Diminta Dalam Dana Suap Gidot

Sambungan dari halaman 1

untuk mendalaminya," tegas juru bicara Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go saat dihubungi Pontianak Post, kemarin.

Menurut Donny, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar yang menangani kasus bantuan khusus (Bansus) pada Badan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2017 itu sudah sangat profesional. Terbukti, kata Donny, pihaknya telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus itu.

"Pada prinsipnya, penyidik menangani kasus itu sudah sangat profesional. Meskipun sedikit tumpang tindih, karena kami harus menunggu perhitungan kerugian keuangan negara yang memakan waktu setidaknya 18 bulan. Saat ini ada dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," beber Donny.

Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah IR dan BB. Keduanya merupakan pegawai Badan Anggaran Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang.

"Sementara ini kedua orang itu yang paling bertanggungjawab. Tapi ada kemungkinan tersangka akan bertambah," terangnya.

Dari penghitungan kekayaan negara (PKN) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) tersebut sebesar Rp19 miliar dan Polda Kalbar, kata dia dapat menyelamatkan aset dengan menyita uang sebesar kurang lebih Rp9 miliar.

Terlepas dari perkara Bansus yang saat ini tengah ditangani Polda kalbar, Donny menyayangkan pernyataan JPU KPK tersebut. Menurutnya pernyataan itu merupakan keterangan sepihak yang seharusnya dikuatkan dengan bukti atau keterangan lain sebelum disampaikan kepada publik.

"Pernyataan itu sepihak. Harus dilengkapi bukti. Jangan sampai menyudutkan penyidik yang saat ini bekerja mengungkap kasus bansus itu," katanya.

Diberitakan sebelumnya, dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Pontianak, Senin

(25/11) pagi dengan menegadili empat orang terdakwa Yosep alias Ateng, Rodi, Bun Si Fat, dan Pandus, JPU KPK menghadirkan empat orang saksi dari lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Mereka adalah Sekda Kabupaten Bengkayang, Obaja; Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang, Marsindi; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang, Agustinus Yan; dan Martinus Suwandi, salah satu Kepala Seksi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang.

Dalam persidangan itu, JPU mencecar beberapa pertanyaan terkait dengan jumlah uang yang diminta oleh Bupati Bengkayang Suryadman Gidot terhadap Kepala Dinas PUPR dan Kelapa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.

Di mana, Bupati Suryadman Gidot menyampaikan permintaan itu pada sejumlah pertemuan atau rapat yang digelar di ruang Sekda Kabupaten Bengkayang.

"Dari keterangan saksi,

Bupati Suryadman Gidot meminta uang kepada Kepala Dinas PUPR dan Kelapa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nilai yang dibutuhkan Rp1 miliar. Kaitannya adalah karena adanya kasus yang sedang diperiksa di Polda Kalbar. Tetapi tidak jelas untuk apa uang itu," beber Jaksa Penuntut Umum KPK Feby D ditemui usai persidangan, Senin (25/11).

Menurut Feby, Bupati Suryadman Gidot juga menjanjikan dana tambahan kepada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan rencananya akan dimasukkan kedalam APBD-Perubahan tahun 2019, yang masing-masing sebesar Rp7,5 miliar untuk Dinas PUPR dan Rp6 miliar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun, dari uang Rp1 miliar itu, lanjut Feby, Kadis PUPR hanya bisa menyanggupi Rp.300 juta dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.200 juta. Terkait penggunaan uang Rp1 miliar tersebut, lanjut Feby, pihaknya juga belum menemukan untuk apa uang tersebut. (arf)